



**DISKAN  
KOTA DUMAI**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

**DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI  
TAHUN 2023**



Jl. Dermaga No. 08 Kelurahan Purnama, Dumai Barat



0765 4300498



dinasperikanan.kotadumai



diskan.dumaikota.go.id



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PERIKANAN**

Jalan Dermaga No. 08 Purnama Telp. (0765) 4300498  
Email : [diskandumai@gmail.com](mailto:diskandumai@gmail.com)/diskan@dumaikota.go.id – Dumai 28823

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. AFRILAGAN, S.H., M.Si  
NIP : 19720412 200112 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/ IV/b  
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai  
Unit Organisasi : Dinas Perikanan Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) ini adalah benar berdasarkan data un-audit per tanggal 2 Januari 2024 yang bersumber pada:

1. SIPKD-SPJ Pengeluaran Fungsional Tahun 2023.
2. Satu Data KKP (data produksi perikanan tangkap dan budidaya).
3. Data Dinas Perikanan (data pegawai, data kelompok binaan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 15 Januari 2024  
KEPALA DINAS PERIKANAN  
KOTA DUMAI  
  
H. AFRILAGAN, S.H., M.Si  
NIP. 19720412 200112 1 003



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan pemerintahan pilihan dibidang kelautan dan perikanan. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perikanan Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Perikanan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai 15 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan  
Kota Dumai



**H. ARI LAGAN, S.H., M.Si**  
NIP. 19720412 200112 1 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan, maka sebagai unsur teknis, Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Perikanan Kota Dumai menjalankan fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan fungsinya

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Perikanan Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 1 (satu) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “ **Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri** “ dan Sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah** yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu “ **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan**“

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Operasionalisasi sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kota DUmai dalam mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2021-2026, adalah dengan



ditetapkannya 4 (empat) program, 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan. Berikut uraiannya

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.2 Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

1.3 Kegiatan administrasi barang milik daerah

1.3.1 Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD

1.4 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

1.4.1 Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.4.2 Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.4.3 Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

1.4.4 Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.4.5 Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.4.6 Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1.5.1 Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan

1.5.2 Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

1.5.3 Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya

1.5.4 Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

1.6 Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1.6.1 Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

1.6.2 Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 1.6.3 Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 1.7 Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  - 1.7.1 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - 1.7.2 Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 1.7.3 Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - 2.1 Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    - 2.1.1 Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
- 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - 3.1 Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
    - 3.1.1 Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil
  - 3.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
    - 3.2.1 Sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - 3.2.2 Sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - 3.2.3 Sub kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
    - 3.2.4 Sub kegiatan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat
- 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - 4.1 Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    - 4.1.1 Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Adapun perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2023 mengalami satu kali perubahan. Perubahan perjanjian kinerja Dinas Perikanan tidak merubah target dari indikator kinerja, yang berubah adalah anggaran yang

dibutuhkan dalam mencapai target kinerja. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	742 ton
		Produksi Perikanan Budidaya	308 ton
		Cakupan bina kelompok nelayan	20 kelompok
		Cakupan bina kelompok budidaya	34 kelompok
		Angka konsumsi ikan	42 kg/kapita/tahun

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kinerja tahun 2023, maka pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Dumai didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.954.063.347 (enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 4 (empat) program kerja, yaitu sebagai berikut.

Tabel 11. Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.294.942.749	APBD
2.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	213.726.500	APBD
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.370.394.798	APBD
4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	74.999.300	APBD
<b>Total</b>		<b>6.954.063.347</b>	

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun (2023)

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp 8.056.886.679 (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Program yang dilaksanakan masih dengan program yang sama. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pagu anggaran dengan capaian kinerja indikator utama. Adapun rincian program kerja dan anggaran pada perubahan tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 12. Program Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.024.608.581	APBD-P
2.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	213.726.500	APBD-P
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.743.552.298	APBD-P
4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	74.999.300	APBD-P
<b>Total</b>		<b>8.056.886.679</b>	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun (2023)

Dinas Perikanan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap (ton)	1.020,3	144,52%	742	1.057,43	142,51%	Sangat Berhasil
		Produksi perikanan budidaya (ton)	382,69	132,88%	308	344,07	111,71%	Sangat Berhasil
		Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	18	100%	20	23	115%	Sangat Berhasil
		Cakupan bina kelompok budidaya (kelompok)	31	100%	34	34	100%	Sangat Berhasil
		Angka Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ tahun)	49,64	118,19%	40	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori **berhasil** dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 93,84%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan perikanan, Dinas Perikanan Kota Dumai didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.056.886.679,- (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Anggaran belanja operasi sebesar Rp.

7.397.327.473,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah dan belanja modal sebesar Rp. 659.559.206,- (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah).

1	Belanja Operasi	: Rp. 7.397.327.473
2	Belanja Modal	: Rp. 659.559.206
	Jumlah	: Rp. 8.056.886.679

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 26. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.050	1.401,5	133,48%			
Sasaran: Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap (ton)	742	1.057,43	142,51%			
	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	308	344,07	111,71%			
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	20	23	115%			
	Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	34	47	138,23%			
	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	42	N/A	N/A			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	6.024.608.581	5.769.386.784	95,76%
Program Pengelolaan Perikanan	Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	76,92%	88,46%	115%	213.726.500	206.674.265	96,70%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	77,5%	117,5%	151,61%	1.743.552.298	1.703.809.367,50	97,72%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase wilayah sampel AKI	100%	100%	100%	74.999.300	74.983.300	99,98%

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Perikanan Kota Dumai menganggarkan belanja operasi dan belanja modal dalam APBD Tahun 2023.

Adapun efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perikanan Kota Dumai

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	142,51%	96,70%	1,33
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	115%		
	Produksi Perikanan Budidaya	111,71%	97,72%	1,28
	Cakupan Bina Kelompok Budidaya	138,23%		
	Angka Konsumsi Ikan	N/A	99,98%	N/A

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang efisien dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum diketahui tingkat efisiensinya. Hal ini dikarenakan belum memiliki data valid terhadap capaian kinerja. Berikut penjelasan masing-masing dari indikator sasaran.

- a. Pada indikator kinerja utama produksi perikanan tangkap dan cakupan bina kelompok nelayan, tingkat efisiensinya adalah 1,33. Hal ini berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja dibagi dengan persentase capaian anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya termasuk dalam kategori efisien.
- b. Untuk indikator kinerja utama produksi perikanan budidaya dan cakupan bina kelompok budidaya, tingkat efisiensinya adalah sebesar 1,28. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya termasuk dalam kategori efisien.
- c. Sedangkan indikator kinerja utama angka konsumsi ikan, belum diketahui tingkat efisiensinya. Hal ini dikarenakan belum memiliki data valid terhadap capaian kinerja.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Isu-isu Strategis .....	6
1.5 Cascading Kinerja.....	7
1.6 Peta Proses Bisnis.....	8
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Rencana Strategis .....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	14
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program .....	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	21
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023.....	38
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra .....	42
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	43
3.5 Akuntabilitas Keuangan .....	43
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	66
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	66
3.8 Prestasi dan Penghargaan .....	67
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai .....	4
2. Cascading Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai.....	8
3. Peta Proses Bisnis Kota Dumai .....	9
4. Pembinaan dan Pendampingan pada Kelompok Nelayan.....	52
5. Pelatihan Laminasi Kapal Bagi Nelayan .....	52
6. Sosialisasi Pengawasan Usaha Perikanan pada Nelayan.....	53
7. Serah Terima Hibah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan .....	55
8. Uji Kualitas Air Menggunakan Alat Ukur Sederhana.....	57
9. Pelatihan Budikdamber Bagi Keluarga Beresiko Stunting .....	57
10. Pembinaan dan Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan ....	59
11. Peringatan Hari Ikan Nasional di Kota Dumai Tahun 2023.....	60
12. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Bunda Kreatif .....	61
13. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Babul Khoiroh.....	61
14. Penghargaan yang Diperoleh Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.....	68

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 – 2023 .....	24
2. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 – 2023 .....	26



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023.....	5
2. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2023 .....	5
3. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal .....	5
4. Rincian Hasil Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan APIP .....	10
5. Saran/Rekomendasi Perbaikan Terhadap Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai .....	10
6. Tindakanjutt Terhadap Rekomendasi yang Diberikan .....	11
7. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.....	15
8. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.....	16
9. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Dumai .....	17
10. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.....	18
11. Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	18
12. Program Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	19
13. Skala Penilaian Realisasi Kinerja .....	20
14. Atribut Capaian Indikator Kinerja .....	21
15. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023 .....	22
16. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 .....	23
17. Data Produksi Perikanan Budidaya Kota Dumai .....	27
18. Data KUB Nelayan Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai.....	31
19. Data Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.....	34
20. Target Capaian Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai Tahun 2017-2022	

	dan Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional.....	38
21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 .....	40
22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	42
23.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .....	43
24.	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023.....	44
25.	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	62
26.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai .....	66
27.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perikanan Kota Dumai .....	66
28.	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 .	68

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Secara lengkap, LKjIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Selain itu, LKjIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dalam penyusunan LKjIP, suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari LKjIP adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efektif, efisien dan akuntabel terhadap masyarakat. Sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran indikator kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya, hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi kinerja, baik itu indikator kinerja, kinerja program dan evaluasi kebijakan daerah. Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah/pemerintah daerah yang menyusun perjanjian kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Dalam penyusunan LKjIP ada beberapa aturan yang menjadi landasan. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2021 Nomor 4 seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D)
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita daerah Kota Dumai Tahun 2022 nomor 22 seri D).

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kinerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandate, delegasi, wewenang ataupun amanah terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

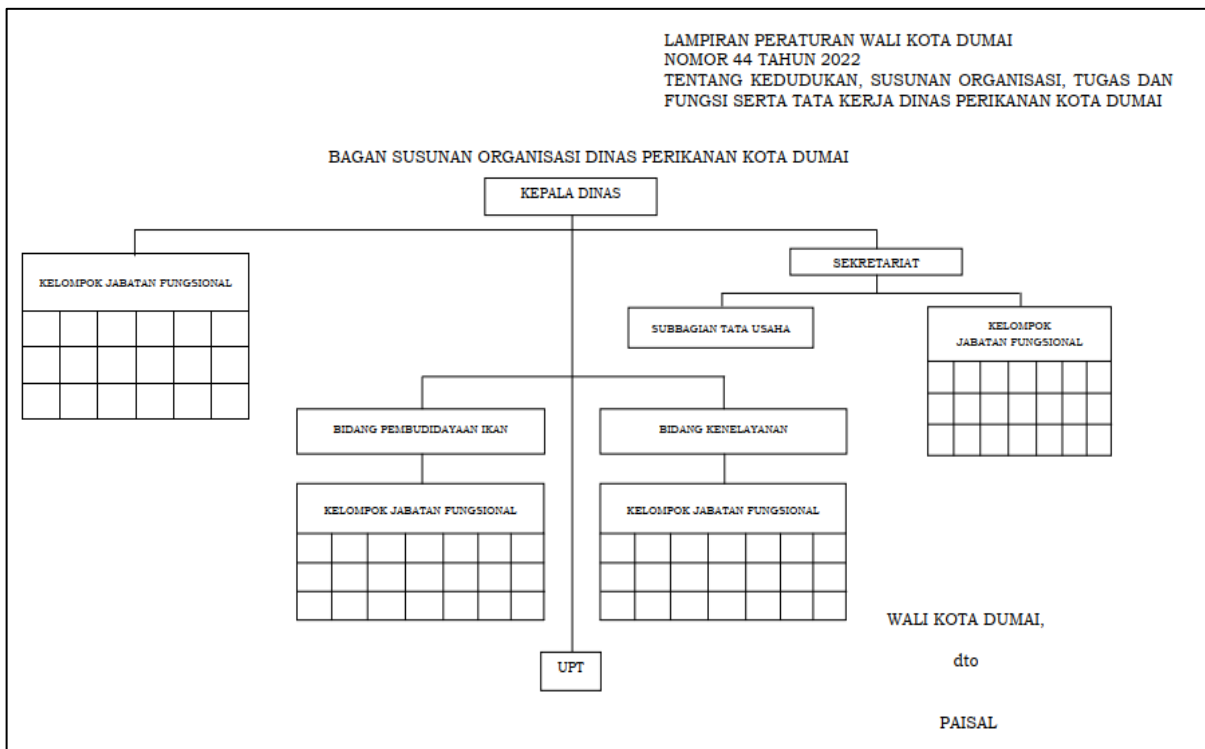
Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai. Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Perikanan Kota Dumai menjalankan fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan keputusan Wali Kota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembudidayaan Ikan, yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kenelayanan, yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai  
Sumber: Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2022

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, didukung dengan 18 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari golongan IV, golongan III dan golongan II, dengan perincian sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan IV	3	16,67
2	Golongan III	14	77,78
3	Golongan II	1	5,55
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Dinas Perikanan di dominasi oleh golongan III sejumlah 14 orang. Berdasarkan jabatan dan eselon, Dinas Perikanan Kota Dumai terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu dapat dilihat pada Tabel 2. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa PNS Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari jabatan Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf/Non Struktural.

Tabel 2. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Eselon II	1	5,55
2	Eselon III	3	16,67
3	Eselon IV	5	27,78
4	Pejabat Fungsional	5	27,78
5	Staf/Non Struktural	4	22,22
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Tingkatan pendidikan pegawai juga dilihat pada gambaran umum organisasi. Walaupun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja Dinas Perikanan, namun hal tersebut menjadi syarat dasar ketetapan penerimaan PNS. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Strata II (S-2)	5	27,78
2	Strata I (S-1)	12	66,67
3	SLTA Sederajat	1	5,55
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud disusunnya LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2023, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya; dan
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **1.4 ISU – ISU STRATEGIS**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pencapaian program.

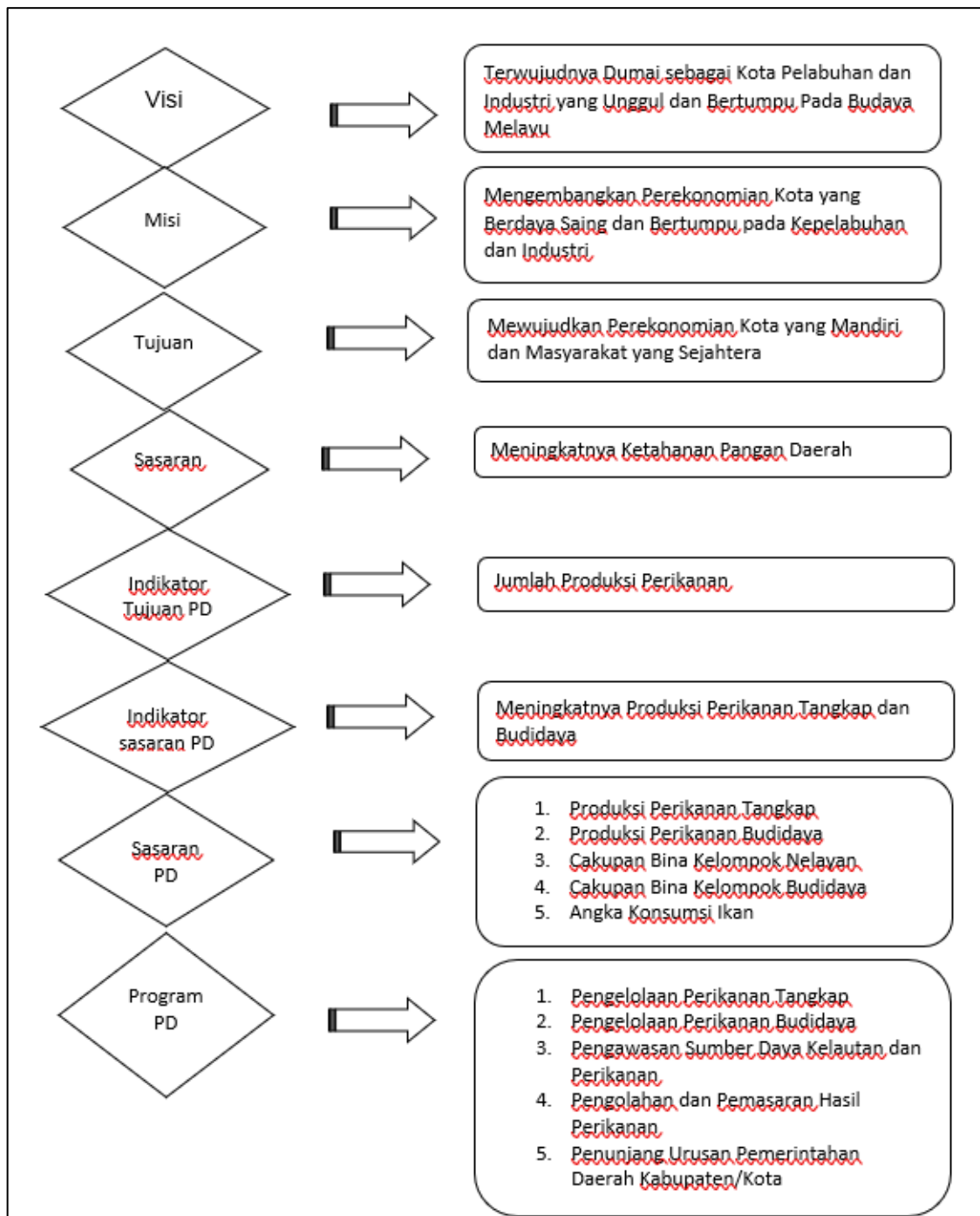
Isu strategis terkait dengan urusan kelautan dan perikanan yang perlu ditangani adalah sebagai berikut

1. Nilai pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan yang rendah di bandingkan pendapatan sektor lainnya, hal ini di pengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Permasalahan Kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut.

- b. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.
  - c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Perikanan yang masih harus di benahi.
  - d. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha perikanan,
  - e. Kurangnya pengawasan dan lemahnya manajemen informasi berbasis teknologi di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan.
  - f. Rendahnya akses modal terhadap usaha pembudidaya ikan dan nelayan karena masih kurang kepercayaan pengendalian modal tersebut.
2. Masih tingginya degradasi lingkungan terutama kawasan pantai baik secara alami maupun secara kesengajaan seperti:
- a. penebangan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir.
  - b. Pembangunan daerah industri dan aktifitasnya di daerah greenbelt (sabuk hijau).
  - c. Kawasan dipengaruhi oleh ROB.

### **1.5 CASCADING KINERJA**

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas. Setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perikanan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 2. Cascading Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai

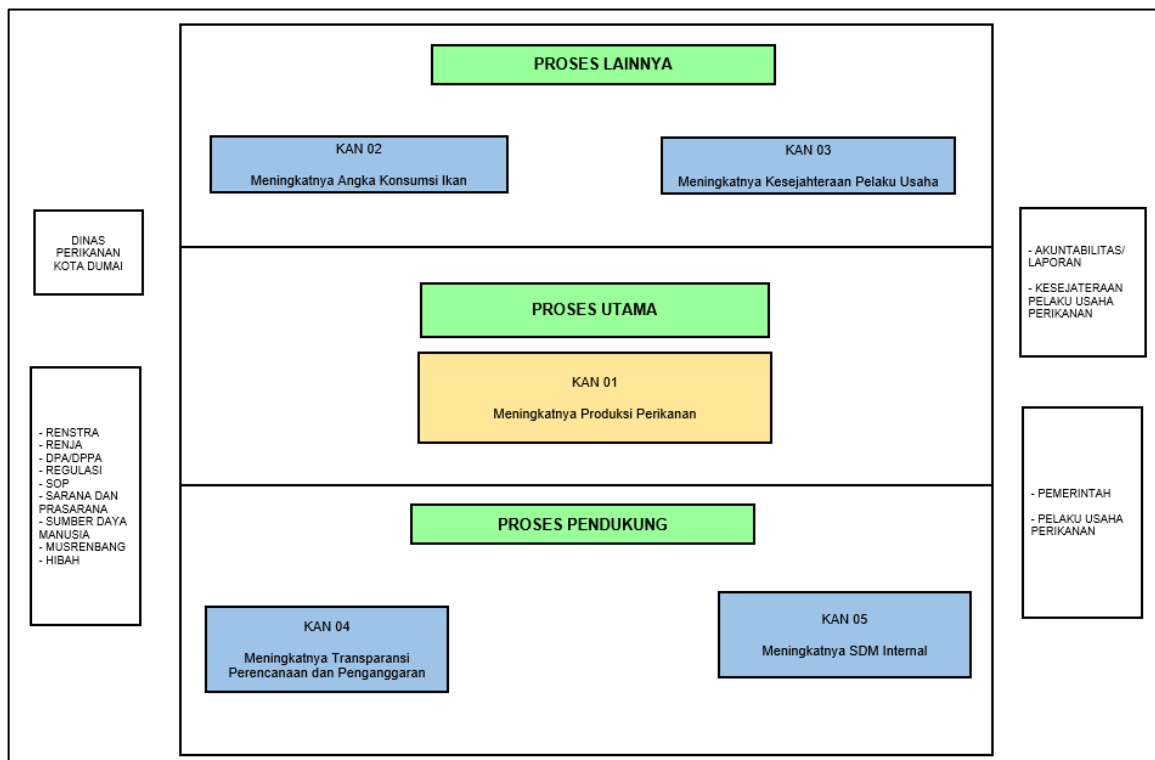
## 1.6 PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi yang menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis dimaksudkan sebagai acuan

bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis agar setiap instansi pemerintah:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.



Gambar 3. Peta Proses Bisnis Kota Dumai

Manfaat yang didapat dari penyusunan peta proses bisnis adalah (1) mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan (2) memiliki standar pelaksanaan pekerjaan, sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Peta proses bisnis Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 3.

## 1.7 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023

Berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Dinas Perikanan sebagaimana tertuang dalam Surat Walikota Dumai Nomor: 700/1299.1/INSP-S tanggal 8 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Perikanan Tahun 2023. Pada hasil evaluasi APIP, Dinas Perikanan Kota Dumai mendapatkan nilai 69,70 dengan predikat B. Adapun rincian hasil penilaian mandiri oleh perangkat daerah dan hasil evaluasi oleh APIP dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Hasil Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah dan APIP

No	Uraian	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Penilaian Mandiri	Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	21,60	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15	11,25	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	17,50
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>76,85</b>	<b>69,70</b>

Sumber: Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Perikanan (2023)

Berdasarkan nilai dan predikat yang diperoleh oleh Dinas Perikanan, terdapat sedikit perbaikan kinerja pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan baru pada level eselon II. Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai mendapatkan, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan demi terwujudnya kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Adapun rekomendasi rekomendasi yang disampaikan dijabarkan pada Tabel 5 di bawah ini

Tabel 5. Saran/Rekomendasi Perbaikan Terhadap Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Kelemahan/Kekurangan	Saran/Rekomendasi
1	Belum menyusun Perjanjian Kinerja eselon III, eselon IV dan staf	Menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang dimulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional maupun staf
2	Rencana aksi hanya disusun untuk eselon II, sedangkan eselon III sampai dengan staf belum disusun	Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari eselon II sampai dengan staf sebagai dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
3	Belum menjelaskan definisi operasional yang menggambarkan cara pencapaian IKU	Menyajikan definisi operasional yang menggambarkan cara pencapaian IKU yang jelas atas kinerja

No	Kelemahan/Kekurangan	Saran/Rekomendasi
4	Tidak memiliki informasi perbandingan capaian kinerja dengan realisasi kinerja dengan DKP Provinsi Riau dan KKP	Memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional pada dokumen LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai
5	Kurangnya tindak lanjut perbaikan terhadap saran/rekomendasi yang telah diberikan	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada dokumen LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai.

Sumber: Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Perikanan (2023)

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, Dinas Perikanan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 6. Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi yang Diberikan

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1	Menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang dimulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional maupun staf	Penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang telah dilakukan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	5 Hari Kerja
2	Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari eselon II sampai dengan staf sebagai dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	1. Koordinasi dengan pejabat dan staf terkait tentang rencana aksi atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. 2. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berjenjang	7 Hari Kerja
3	Menyajikan definisi operasional yang menggambarkan cara pencapaian IKU yang jelas atas kinerja	Menyajikan definisi operasional yang menggambarkan cara pencapaian IKU akan disampaikan pada penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2023	5 Hari Kerja
4	Memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional pada dokumen LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai	Melakukan persandingan data terhadap IKU terkait dengan DKP Provinsi dan KKP melalui aplikasi satu data.	5 Hari Kerja
5	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada dokumen LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai.	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada dokumen LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dengan memperhatikan saran/rekomendasi yang telah diberikan	10 Hari Kerja

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

## BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023. Baik itu secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain kondisi riil, potensi hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Perikanan Kota Dumai membuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal tersebut didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan Kota Dumai. Renstra juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Kota Dumai. Oleh karena itu, dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perikanan Kota Dumai.

Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 mempedomi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”**



Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota Pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah Pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sector pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan melayu dianggap sebagai roh pembangunan Kota Dumai dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanta sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026, perlu didukung dengan misi. Adapun misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Berdasarkan keterangan di atas, untuk merealisasikan visi, misi yang mendukung kegiatan perikanan adalah misi 1, yaitu

**“Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri”**

Misi ini ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip *cooperative* (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional.

Untuk mendukung misi 1, Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Tolok ukur dari tujuan tersebut adalah jumlah produksi perikanan dalam satuan ton. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, meliputi:

- 1) Produksi perikanan tangkap
- 2) Produksi perikanan budidaya
- 3) Cakupan bina kelompok nelayan
- 4) Cakupan bina kelompok budidaya
- 5) Angka Konsumsi Ikan.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mendukung visi dan misi Kota Dumai, Dinas Perikanan Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021-2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen penting dalam penjabaran visi dan misi daerah, khususnya Kota Dumai. Penetapan tujuan dan sasaran perlu dilakukan dalam bentuk terukur dan spesifik. Selain menjabarkan visi dan misi daerah, serta menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis, juga merupakan penyelarasan capaian indikator kinerja pembangunan Kota Dumai dengan indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Perikanan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan visi dan misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada tujuan pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Dumai.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dimana tata cara pencapaian target dan sasaran akan dituangkan ke dalam strategi dan arah kebijakan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai. Indikator kinerja sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam penetapan kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan program kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

<b>Visi: Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu</b>					
<b>Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Target</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah produksi perikanan	1049 ton	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap	742 ton
				Produksi perikanan budidaya	308 ton
				Cakupan bina kelompok nelayan	20 kelompok
				Cakupan bina kelompok budidaya	34 kelompok
				Angka konsumsi ikan	42 kg/kapita/tahun

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

## 2.3 KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan Langkah-langkah yang berisikan program yang dapat mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah Langkah-langkah rencana strategis dan arahan kebijakan yang dituangkan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan pagu indikatif. Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Perikanan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran

renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna. Adapun rumusannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 8. Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

<b>VISI: TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU</b>			
<b>MISI I: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHAN DAN INDUSTRI</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil</li> <li>2. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap</li> <li>3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap</li> <li>4. Pengembangan kapasitas nelayan kecil</li> <li>5. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil</li> <li>6. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil</li> </ol>
		Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan</li> <li>2. Pembinaan dan pemantauan serta pelatihan bagi pembudidaya ikan</li> <li>3. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya</li> <li>4. Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan</li> <li>5. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan</li> </ol>
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan</li> <li>2. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk</li> </ol>

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Dumai disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi Perikanan Tangkap</li> <li>2. Produksi Perikanan Budidaya</li> <li>3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan</li> <li>4. Cakupan Bina Kelompok Budidaya</li> <li>5. Angka Konsumsi Ikan</li> </ol>

Sumber: Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah (1) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, (2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi, (4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah, dan (5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	742 ton
		Produksi Perikanan Budidaya	308 ton
		Cakupan bina kelompok nelayan	20 kelompok
		Cakupan bina kelompok budidaya	34 kelompok
		Angka konsumsi ikan	42 kg/kapita/tahun

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kinerja tahun 2023, maka pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Dumai didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.954.063.347 (enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 4 (empat) program kerja, yaitu sebagai berikut.

Tabel 11. Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.294.942.749	APBD
2.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	213.726.500	APBD
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.370.394.798	APBD
4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	74.999.300	APBD
<b>Total</b>		<b>6.954.063.347</b>	

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun (2023)

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dengan dukungan pagu anggaran sebesar Rp 8.056.886.679 (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Program yang dilaksanakan masih dengan program yang sama. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pagu anggaran dengan capaian kinerja indikator utama. Adapun rincian program kerja dan anggaran pada perubahan tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 12. Program Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.024.608.581	APBD
2.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	213.726.500	APBD
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.743.552.298	APBD
4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	74.999.300	APBD
<b>Total</b>		<b>8.056.886.679</b>	

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun (2023)



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Dinas Perikanan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 13 Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 (dua) rumus perhitungan yaitu:

- a. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- b. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

sedangkan kriteria pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 14. Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Atribut
1	85% - 100%	Sangat Berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55% - 70%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Tidak Berhasil

### 3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

Dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Perikanan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut

dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Perikanan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis/kinerja utama dengan 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam 15 di bawah ini.

Tabel 15. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			Predikat Capaian
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap (ton)	1.020,3	144,52%	742	1.057,43	142,51%	Sangat Berhasil
		Produksi perikanan budidaya (ton)	382,69	132,88%	308	344,07	111,71%	Sangat Berhasil
		Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	18	100%	20	23	115%	Sangat Berhasil
		Cakupan bina kelompok budidaya (kelompok)	31	100%	34	34	100%	Sangat Berhasil
		Angka Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ tahun)	49,64	118,19%	40	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel di atas, berikut analisis pejabaran atas capaian indikator kinerja utama ini sebagai berikut:

### IKU PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan. Data disajikan dalam satuan ton. Khusus Kota Dumai, produksi perikanan tangkap merupakan hasil penangkapan ikan di laut, bukan di perairan umum daratan (PUD). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut

$$\text{Produksi} = \text{fraksi sampel} \left( \frac{N}{n} \right) \times \text{produksi sampel} (p)$$

dimana:

N = Jumlah alat penangkapan ikan per stratifikasi dalam satu kabupaten/kota

n = sampel setiap stratifikasi alat penangkapan ikan

p = produksi sampel perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap memiliki peran penting terhadap komoditas perikanan laut terhadap pasokan ikan di Kota Dumai. Jenis ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan bervariasi, seperti Acang-acang bombay atau yang dikenal dengan nama ikan Lomek, Bawal Putih, Belanak, Bulu Ayam, Gemprang, Golok-Golok, Gulamah, Hiu Pilus, Kakap, Kerapu Batik, Senangin, Layur, Manyung Besar, Pari Kembang, Pucuk Nipah, Rajungan, Sembilang, Tenggiri Papan, Tetengkek, Udang Harimau, Udang Orange, dan Udang Putih. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	
		2022	2023
1	Acang-acang Bombay ( <i>Harpadon nehereus</i> )	201.051	261.736
2	Bawal Putih ( <i>Pampus argenteus</i> )	4.307	1.309
3	Belanak ( <i>Mugil cephalus</i> )	1.243	775
4	Bulu Ayam ( <i>Thryssa hamiltonii</i> )	37.155	65.154
5	Gemprang ( <i>Ilisha elongata</i> )	166.302	179.927
6	Golok-golok ( <i>Chirocentrus dorab</i> )	56.903	33.062
7	Gulamah ( <i>Gymnocranius griseus</i> )	11.546	3.073
8	Hiu Pilus ( <i>Rhizoprionodon acutus</i> )	-	1.891
9	Kakap ( <i>Liopropoma randalli</i> )	57.009	48.045
10	Kerapu Batik ( <i>Epinephelus polyphekadion</i> )	2.979	329
11	Kuro; Senangin ( <i>Eleutheronema tetradactylum</i> )	87.120	78.677
12	Layur ( <i>Trichiurus lepturus</i> )	10.052	24.105
13	Manyung Besar ( <i>Netuma thalassina</i> )	82.514	75.444
14	Pari Kembang ( <i>Neotrygon kuhlii</i> )	38.016	20.749
15	Pucuk Nipah ( <i>Muraenesox bagio</i> )	1.900	6.485
16	Rajungan ( <i>Portunus pelagicus</i> )	25.576	827
17	Sembilang Betul ( <i>Plotosus canius</i> )	44.928	52.197
18	Tenggiri Papan ( <i>Scomberomorus guttatus</i> )	82.477	89.300
19	Tetengkek ( <i>Megalaspis cordyla</i> )	49.913	29.980
20	Udang Harimau ( <i>Parapenaeopsis sculptilis</i> )	1.866	8.839
21	Udang Orange ( <i>Atypopenaeus formosus</i> )	38.160	43.329
22	Udang Putih; Udang Api-api ( <i>Metapenaeus eboracensis</i> )	19.283	32.200
<b>Total</b>		<b>1.020.300</b>	<b>1.057.433</b>

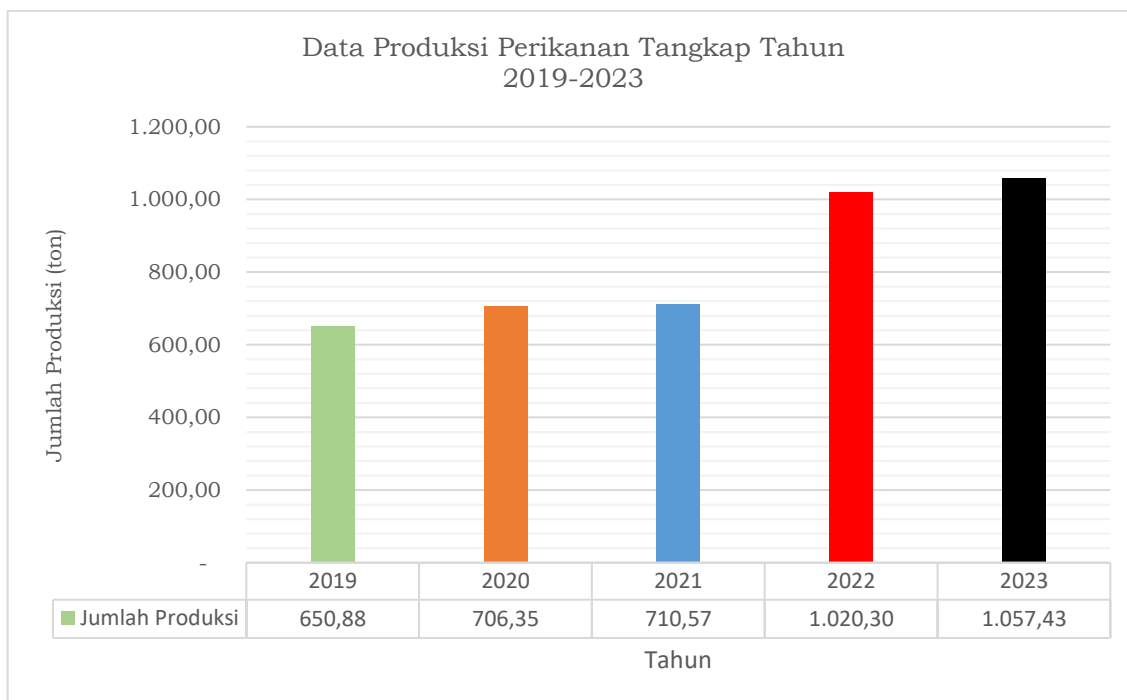
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel 16, diketahui bahwa produksi perikanan tangkap Kota Dumai masih didominasi dengan ikan Acang-acang bombay atau yang lebih dikenal dengan ikan lomek dan ikan Gemprang atau lebih dikenal dengan nama ikan Puput. Ikan lomek merupakan ikan khas Kota Dumai yang biasa dikonsumsi dalam bentuk ikan

segar maupun yang dikeringkan. Ikan lomek hidup diperairan laut, payau maupun lepas pantai yang berlumpur atau berpasir dengan kedalaman 50 meter. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan lomek menjadikan ikan tersebut sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang potensial.

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 berdasarkan data adalah sebesar 1.057,43 ton atau mencapai 142,51% dari target tahun 2023. Apabila dilihat pada Tabel 16 di atas, terdapat 4 (empat) jenis ikan yang menurun signifikan hasil tangkapannya, seperti Bawal Putih, Gulamah, Kerapu Batik, dan Rajungan. Hal ini bisa terjadi karena akibat dari dampak perubahan iklim memicu musim ikan yang tidak menentu. Namun penurunan produksi dari beberapa jenis ikan ini, tidak mempengaruhi terhadap capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap.

Produksi perikanan tangkap diukur, divalidasi dan dilaporkan secara berkala setiap semester. Jika dibandingkan dengan data 4 (empat) tahun sebelumnya, terjadi peningkatan data produksi perikanan tangkap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu (1) teknologi tepat guna, (2) penyuluhan, (3) bantuan pemerintah, dan (4) lama melaut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini



Grafik 1. Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Analisis atas capaian IKU produksi perikanan tangkap dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama produksi perikanan tangkap menunjukkan capaian yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (dapat dilihat pada Tabel 16 dan Grafik 1). Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 742 ton dengan realisasi sebesar 1.057,43 ton atau sebesar 142,51% dan. Capaian kinerja bernilai sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1.020,3 ton, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 3,64%.
2. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator yang melebihi dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
  - a. Koordinasi dengan PT. Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
  - b. Mempermudah akses pendanaan dan pemodaln bagi nelayan untuk operasional melaut, baik melalui program KUR, Kredit Mikro, dan kredit program lainnya.
  - c. Penyaluran bantuan pemerintah, baik kabupaten/kota, provinsi maupun pusat untuk nelayan.
3. Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat dalam capaian indikator, yaitu sebagai berikut:
  - a. Naiknya harga BBM bersubsidi, sehingga menyebabkan biaya operasional untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut juga meningkat
  - b. Cuaca dan gelombang tinggi pada akhir tahun 2023.
  - c. Kewenangan daerah dalam pemberdayaan nelayan kecil
4. Tindak lanjut capaian indikator kinerja utama produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut
  - a. Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok nelayan
  - b. Pelatihan nelayan berupa laminasi kapal yang diikuti oleh KUB binaan Dinas Perikanan Kota Dumai. Kegiatan pelatihan ini bekerjasama dengan Politeknik KP Dumai.
  - c. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait wewenang kabupaten/kota dalam pemberdayaan nelayan. Hasil koordinasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa kabupaten/kota bisa memberikan bantuan kepada nelayan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

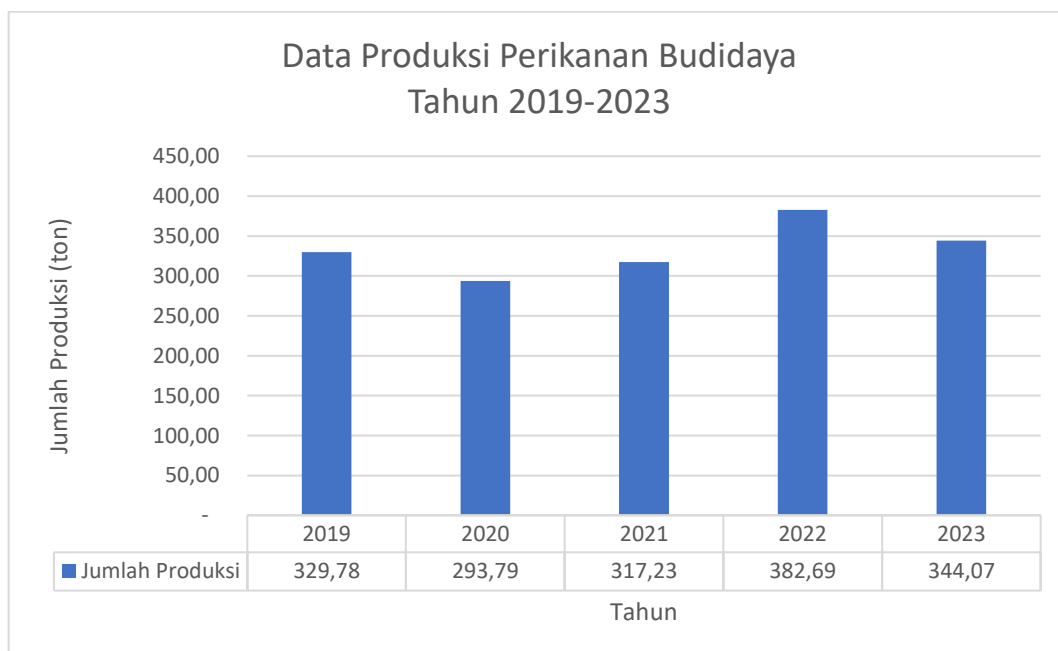
## IKU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi perikanan budidaya merupakan pengumpulan data dari semua hasil pembudidayaan ikan yang dipelihara, dibesarkan, dan/atau dibiakkan serta dipanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, yang sebagian besar untuk dijual, termasuk jumlah ikan yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada pekerja sebagai upah. Satuan yang digunakan dalam bentuk ton. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Produksi} = \text{fraksi sampel} \left( \frac{N}{n} \right) \times \text{produksi sampel} (p)$$

dimana:

- N = Jumlah jenis pembesaran ikan per stratifikasi dalam satu kabupaten/kota
- n = sampel setiap stratifikasi pembesaran ikan
- p = produksi sampel perikanan budidaya



Grafik 2. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 adalah sebesar 344,07 ton dan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni sebesar 308 ton, maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 111,71%. Berdasarkan Grafik 2



di atas, pencapaian data produksi perikanan budidaya tertinggi adalah pada tahun 2022 dengan total produksi sebesar 382,69 ton dan terendah pada tahun 2020 dengan total produksi sebesar 293,79 ton. Ada 7 (tujuh) komoditas, yang menyumbang hasil produksi pada tahun 2022, yaitu Nila, Gurami, Lele, Patin, Bawal, Bandeng, dan Udang Vanname. Penurunan produksi pada tahun 2020 disebabkan karena di Indonesia, khususnya di Kota Dumai terkena pandemi Covid-19.

Adapun rincian data produksi perikanan budidaya tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 17. Data Produksi Perikanan Budidaya Kota Dumai

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	
		2022	2023
1	Nila	17.230	9.000
2	Gurami	2.462	1.300
3	Lele	260.641	233.574
4	Patin	3.485	2.125
5	Bawal	5	-
6	Bandeng	247	-
7	Udang Vanname	98.624	97.933
8	Kepiting	-	40
<b>Total</b>		<b>382.694</b>	<b>344.072</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel di atas, ada 6 (enam) jenis yang menjadi prioritas utama penyumbang data produksi perikanan budidaya, yaitu nila, gurami, lele, patin, udang vanname dan kepiting. Dari keenam komoditas tersebut, lele merupakan penyumbang terbesar produksi perikanan budidaya di Kota Dumai yaitu sebesar 233.574 kg. Budidaya ikan lele sangat menguntungkan jika dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek pemanfaatan lahan. Budidaya ikan lele dapat memanfaatkan lahan kritis yang tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Ikan lele dapat hidup diperairan yang minim dan kualitas air yang kurang baik.
2. Aspek teknologi. Budidaya ikan lele tidak membutuhkan teknologi yang mutakhir. Yang diperlukan adalah tekun dan telaten.
3. Aspek ekonomi. Budidaya ikan lele tidak memerlukan modal yang besar, sehingga dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Hasil dari budidaya ikan lele dapat dijual ataupun dikonsumsi sendiri sebagai pemenuhan gizi keluarga.
4. Aspek sosial. Ikan lele merupakan komoditas yang dapat diterima oleh masyarakat banyak.

Selain lele, udang vanname sebagai penyumbang produksi perikanan budidaya terbesar ke dua di Kota Dumai. Saat ini budidaya udang merupakan suatu peluang usaha yang menjanjikan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan udang sebagai salah satu komoditas yang banyak diminati oleh pasar global. Modal dan biaya produksi yang diperlukan untuk budidaya udang sangat besar. Walaupun begitu, keuntungan minimal yang diterima adalah sebesar 30%. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, terjadi penurunan produksi udang vanname sebesar 31% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan oleh infeksi penyakit. Infeksi penyakit dapat menyebabkan terjadinya kematian masal, dan jika dibiarkan akan merugikan petambak. Keparahan infeksi penyakit pada udang bergantung pada kondisi wilayah budidaya, waktu budidaya dan musim.

Mendeteksi udang yang terkena penyakit cukup sulit untuk dilakukan secara langsung, sehingga perlu dilakukan uji laboratorium sampel udang yang memiliki gejala terserang penyakit. Pada umumnya, petambak mengobati udang yang terkena penyakit dengan memberikan antibiotik. Namun saat ini, penggunaan antibiotik dilarang karena dapat menyebabkan resisten patogen terhadap antibiotik dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara petambak mengatasi kematian dini akibat terserang penyakit, yaitu sebagai berikut:

1. Jika ada udang yang terkena penyakit, semua udang dalam satu kolam diangkat dan dimatikan. Udang yang sudah mati harus langsung dibersihkan dari kolam agar tidak terjadinya penularan penyakit ke kolam lain. Segera lakukan pengeringan dan disinfeksi kolam supaya patogen penyebab penyakit mati, tidak menular ke udang yang lain.
2. Membesarkan udang yang tersisa sampai size tertentu agar harganya bisa lebih naik. Namun, solusi ini hanya berlaku pada gejala yang tidak cukup serius dan masih bisa dilanjut siklusnya.

Selain cara di atas, ada beberapa rekomendasi cara mencegah udang vanname mati dini akibat penyakit, yaitu sebagai berikut.

1. Memilih induk udang yang terbaik.
2. Menjaga kebersihan fasilitas tambak
3. Mengimplementasikan biosekuriti. Biosekuriti merupakan Tindakan pencegahan masuknya inang penyakit agar lingkungan tambak terkontrol dengan maksimal dan bebas dari penyakit.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut analisa atas capaian indikator kinerja utama produksi perikanan budidaya, yaitu sebagai berikut.

1. Capaian kinerja untuk indikator produksi perikanan budidaya menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 308 ton dengan capaian sebesar 344,07 ton atau sebesar 111,71%. Capaian kinerja bernilai sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 382,69 ton, maka capaian pada tahun 2023 menurun sebesar 10,09%.
2. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator produksi perikanan budidaya yang melebihi dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut.
  - a. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara kontinu oleh tenaga penyuluh PNS dan non PNS terhadap kelompok pembudidaya ikan.
  - b. Fasilitasi bantuan hibah kepada kelompok pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan meningkatkan pendapatan.
3. Faktor penghambat capaian indikator yang mengalami penurunan sebesar 10,09% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan oleh:
  - a. Pertumbuhan ikan yang melambat. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan adalah kualitas air, benih, dan pakan
  - b. Tingginya tingkat kematian saat pemeliharaan. Faktor yang mempengaruhi adalah kualitas benih, penanganan saat panen benih, transportasi benih dan aklimasi penebaran benih
  - c. Adanya serangan penyakit
  - d. Fluktuasi harga pakan di pasaran
4. Tindak lanjut capaian indikator produksi perikanan budidaya adalah sebagai berikut
  - a. Penyediaan benih yang berkualitas untuk menghasilkan pertumbuhan ikan yang baik.
  - b. Melakukan uji kualitas air sebelum melakukan pembudidayaan ikan. Kegiatan ini sudah bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kota Dumai.
  - c. Menjaga kebersihan lingkungan kolam untuk mengurangi tingkat kematian dan serangan penyakit.

- d. Apabila kematian disebabkan karena penyakit, perlu dilakukan identifikasi jenis penyakitnya dan bekerja sama dengan stakeholder terkait yang menangani penyakit ikan

### **IKU CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN**

Cakupan bina kelompok nelayan merupakan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah daerah dibagi dengan target pada tahun berkenaan dan dikalikan dengan seratus persen. Cakupan bina kelompok nelayan merupakan persentase kelompok binaan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berkenaan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan serta bantuan dari pemerintah daerah untuk tumbuh, berkembang dan meningkatkan pendapatan. Kelompok binaan nelayan dikenal dengan nama kelompok usaha bersama (KUB)

KUB nelayan merupakan kelompok yang dibentuk oleh berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2021 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, syarat pembentukan KUB adalah sebagai berikut.

1. Memiliki jumlah anggota kelompok 10-25 orang
2. Pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok
3. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan
4. Memiliki kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi dan Bahasa
5. Bersifat informal
6. Memiliki saling ketergantungan antar individu
7. Mandiri dan partisipatif
8. Memiliki aturan/norma yang disepakati bersama
9. Memiliki administrasi yang rapi

Pembentukan KUB dapat memberikan manfaat bagi nelayan Kota Dumai. Adapun manfaat yang dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa kepentingan bersama
2. Menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama
3. Mempermudah proses kemitraan usaha
4. Mempermudah akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan, pengembangan dan diversifikasi usaha
6. Sebagai pemersatu aspirasi yang murni dan sehat
7. Sebagai wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta bekerja sama
8. Sebagai fasilitator penyampaian dan pelaksanaan kebijakan pemerintah bagi nelayan.

Pada tahun 2023, jumlah kelompok binaan sebanyak 23 kelompok. Kelompok tersebut tersebar di Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kecamatan Dumai Barat (Tabel 18). Alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang, rawai, sondong, pengering, dan jaring udang.

Tabel 18. Data KUB Nelayan Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai

No.	Nama KUB	Kelurahan	Kecamatan
1	KUB Nelayan Sejahtera	Pelintung	Medang Kampai
2	KUB Medang Kampai Jaya	Pelintung	Medang Kampai
3	KUB Nelayan Bunga Mawar	Pelintung	Medang Kampai
4	KUB Mundam Jaya	Mundam	Medang Kampai
5	KUB Nelayan Tuna	Tanjung Palas	Dumai Timur
6	KUB Harapan Baru	Geniot	Sungai Sembilan
7	KUB Muara Geniot	Geniot	Sungai Sembilan
8	KUB Terbit Fajar	Basilam Baru	Sungai Sembilan
9	KUB Basilam Pesisir	Basilam Baru	Sungai Sembilan
10	KUB Lomek	Purnama	Dumai Barat
11	KUB Batu Karang	Purnama	Dumai Barat
12	KUB Maju Jaya	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan
13	KUB Nelayan Bersatu Jaya	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan
14	KUB Hiu Mas	Bangsai Aceh	Sungai Sembilan
15	KUB Kuda Laut	Bangsai Aceh	Sungai Sembilan
16	KUB Teluk Makmur	Teluk Makmur	Medang Kampai
17	KUB Guntung Sejati	Guntung	Medang Kampai
18	KUB Terubuk Jaya	Basilam Baru	Sungai Sembilan
19	KUB Mekar Jaya	Purnama	Dumai Barat

No.	Nama KUB	Kelurahan	Kecamatan
20	KUB Senangin	Purnama	Dumai Barat
21	KUB Sungai Sepit Berkah	Batu Teritip	Sungai Sembilan
22	KUB Sampan Dayung	Purnama	Dumai Barat
23	KUB Ikan Tenggiri	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Analisis terhadap capaian indikator kinerja utama cakupan bina kelompok nelayan adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 20 kelompok dengan capaian sebanyak 23 kelompok atau sebesar 115%. Capaian ini bernilai kinerja sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 18 kelompok, terjadi peningkatan sebesar 27,78%. Pada tahun 2023, terjadi penambahan 3 (tiga) kelompok baru, yaitu KUB Sungai Sepit Berkah, KUB Sampan Dayung, dan KUB Ikan Tenggiri. Dan pada tahun yang sama, terdapat 2 (dua) kelompok lama yang aktif kembali melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut, yaitu KUB Senangin dan KUB Mekar Jaya.
2. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator cakupan bina kelompok nelayan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
  - a. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara kontinu
  - b. Sharing informasi dan ilmu terkait pengembangan kelembagaan nelayan
  - c. Fasilitasi bantuan hibah dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat.
3. Faktor penghambat dalam capaian indikator cakupan bina kelompok nelayan adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah penyuluh tidak sebanding dengan wilayah kerja pembinaan dan pendampingan
  - b. Minimnya sarana dan prasarana yang disediakan
  - c. Pola pikir yang masih tradisional dalam pengembangan kelembagaan nelayan.
4. Tindak lanjut capaian indikator cakupan bina kelompok nelayan adalah sebagai berikut:
  - a. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kewenangan Kabupaten/Kota tentang pemberdayaan nelayan kecil

- b. Memberikan ransangan berupa motivasi kepada nelayan tentang keuntungan/manfaat untuk berkelompok
- c. dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Pemerintah Kota Dumai, khususnya Dinas Perikanan Kota Dumai dapat memfasilitasi pemberian hibah kepada kelompok nelayan dalam rangka peningkatan pendapatan;
- d. melakukan penilaian kelas KUB untuk kelompok nelayan. Penilaian ini dilakukan untuk melihat perkembangan kelompok nelayan binaan Dinas Perikanan Kota Dumai.

Pembinaan terhadap KUB dilakukan oleh tenaga penyuluh Non PNS dan PNS bidang Kenelayanan-Dinas Perikanan. Pelaksanaan pembinaan biasanya dilakukan secara persuasif. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada nelayan untuk sadar berkelompok. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, penumbuhan kelembagaan pelaku utama adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat dijadikan sebagai faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok.

#### **IKU CAKUPAN BINA KELOMPOK BUDIDAYA**

Sama halnya dengan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Syarat pembentukan dan hal-hal lain yang perlu dilengkapi, hampir sama dengan pembentukan kelompok nelayan.

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merupakan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah daerah dibagi dengan target pada tahun berkenaan dan dikalikan dengan seratus persen. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merupakan persentase kelompok binaan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berkenaan yang mendapatkan pembinaan,

pendampingan serta bantuan dari pemerintah daerah untuk tumbuh, berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Tabel 19. Data Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Nama Kelompok	Alamat	Bidang Usaha
1	Sumber Berkah	Jl. Bagan Keladi	Pembesaran
2	Mutiara Hati	Jl. Bunga Tujuh	Pembesaran
3	Palas Jaya	Jl. Bandes	Pembesaran
4	Rejo Bersama	Jl. Sri Wedari Ujung	Pembesaran
5	Al-Huda Jaya	Jl. Baru Gg. Handayani	Pembesaran
6	Sei Guntung	Jl. Lestari RT. 02 Kel. Guntung	Pembesaran
7	Cemerlang	Jl. Lestari RT. 02 Kel. Guntung	Pembesaran
8	Perwira 3	Jl. Gunung Bromo	Pembesaran
9	Putra Mandiri	Jl. Pendidikan	Pembesaran
10	Bunga Tanjung Jaya	Jl. Bunga Tanjung	Pembesaran
11	Keluarga Bunga Tanjung	Jl. Bunga Tanjung	Pembesaran
12	Pancasila Mandiri	Jl. Bukit Datuk Lama	Pembesaran
13	Gema	Jl. BBI	Pembesaran
14	Bagan Lestari	Jl. Hidayah	Pembesaran
15	Pemuda Pancasila	Jl. Perumnas BBI	Pembesaran
16	UPR Sejahtera Bersama	Jl. BBI	Pembenihan
17	Sitolong Nadangol	Jl. Soekarno Hatta	Pembesaran
18	Nila Merah	Jl. Baru	Pembesaran
19	Mawar	Jl. Sukaramai	Pembenihan dan Pembesaran
20	Kayu Kapur Makmur	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur	Pembesaran
21	Tunas Pesisir	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
22	Geniut Bersatu	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
23	Maju Bersama	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
24	Camur Laut	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
25	Windu Jaya	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
26	Makmur Sejahtera	Jl. Makmur	Pembesaran
27	Sepakat Jaya	Jl. Kaplingan	Pembesaran
28	Jumbo Power	Jl. Sepakat Kel. Gurun Panjang	Pembesaran
29	Amanah Jaya	Jl. Utama Kel. Kampung Baru	Pembesaran
30	Pemuda Punak	Jl. Punak, Kel. Purnama	Pembesaran
31	Berkah Jaya	Jl. Tanjung Sari Gg. Tanjung Mulia	Pembesaran
32	Kreatif	Jl. Kaharuddin Nasution No.123 Gg. Nusa Indah	Pembesaran
33	Mundam Berbakti	Jl. Muslim RT.04 Kel. Mundam	Pembesaran
34	Mina Jaya	Jl. Nakula 1 Bunga Tanjung RT.28 Kel. Bukit Datuk	Pembesaran
35	Koperasi Jasa Mandiri Jaya Lestari	Jl. Raya PU RT.021 Kel. Basilam Baru	Pembesaran
36	Mekar Tunggal	Jl. Adi Putra Tianjung	Pembesaran
37	Sumber Rizqi Perwira	Jl. Perwira Gg. Baru	Pembesaran
38	Melati Jaya	Kelurahan Tanjung Palas	Pembesaran



No	Nama Kelompok	Alamat	Bidang Usaha
39	Prabu Jaya	Kelurahan Tanjung Palas	Pembesaran
40	Fastabiqul Khoirot	Jl. Siliwangi, Kelurahan Jaya Mukti	Pembesaran
41	Rindu Malam	JL. Merdeka Baru	Pembesaran
42	Harapan Permai	Guntung	Pembesaran
43	Perintis	Jl. Dumai Pakning	Pembesaran
44	Siak Maju Bersama	Jl. Bunga Kelurahan Kampung Baru	Pembesaran
45	Lamegogo	Jl. Siak Kelurahan Kampung Baru	Pembesaran
46	Sepakat	Jl. Arifin Ahmad	Pembesaran
47	Penempul Mandiri	Sungai Geniot	Pembesaran

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Analisis capaian indikator cakupan bina kelompok budidaya adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk indikator cakupan bina kelompok budidaya menunjukkan capaian kinerja yang meningkat. Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 34 kelompok dengan realisasi capaian sebanyak 47 kelompok atau sebesar 138,23%. Capaian tersebut bernilai kinerja sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 31 kelompok, maka pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 51,61%. Pada tahun 2023 terdapat penambahan 4 (empat) kelompok baru, yaitu POKDAKAN Melati Jaya, POKDAKAN Prabu Jaya, POKDAKAN Fastabiqul Khoirot, dan POKDAKAN Harapan Permai, serta 12 kelompok lama aktif kembali melakukan aktivitas pembudidayaan ikan.
2. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator kinerja utama cakupan bina kelompok budidaya adalah sebagai berikut:
  - a. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara kontinu
  - b. Sharing informasi dan ilmu terkait pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan
  - c. Fasilitasi bantuan hibah dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat.
3. Faktor penghambat capaian indikator cakupan bina kelompok budidaya adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah penyuluh tidak sebanding dengan wilayah kerja pembinaan dan pendampingan
  - b. Minimnya sarana dan prasarana yang disediakan

- c. Pola pikir yang masih tradisional dalam pengembangan kelompok pembudidaya ikan
4. Tindak lanjut capaian indikator cakupan bina kelompok budidaya adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan ransangan berupa motivasi kepada nelayan tentang keuntungan/manfaat untuk berkelompok
  - b. Melakukan penilaian kelas KUB untuk kelompok pembudidaya ikan. Penilaian ini dilakukan untuk melihat perkembangan kelompok pembudidaya ikan binaan Dinas Perikanan Kota Dumai.
  - c. Fasilitasi pemberian hibah kepada kelompok pembudidaya ikan kedepannya harus lebih selektif. Karena pemberian hibah ini ditujukan untuk peningkatan pendapatan dan peningkatan produksi.

#### **IKU ANGKA KONSUMSI IKAN**

Sebagai sumber pangan utama, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik, seperti protein, asam lemak omega 3 dan 6, vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak, ibu dan janin. Sampai dengan saat ini, Dinas Perikanan memiliki satu program yang menggalakkan masyarakat untuk mau makan ikan.

Ikan dan olahan hasil perikanan merupakan komoditas pangan sumber protein yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian. Sebagai komoditi ekonomi, ikan memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa negara. Untuk itu diperlukan daya saing dengan menjaga mutu dan keamanan pangan. Standarisasi keamanan produksi ikan, selain untuk meningkatkan daya saing dalam pasar duni, juga untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Nilai strategis ikan dalam kontribusi ketahanan gizi nasional, meliputi:

1. Potensi produksi yang sangat besar
2. Memiliki kandungan gizi tinggi
3. Harga ekonomis
4. Keragaman jenis sangat tinggi dan tersedia sepanjang tahun
5. Ikan termasuk ke dalam *white meat* yang tingkat kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan *red meat* seperti daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya.
6. Ikan memiliki asam amino yang lengkap

7. Kandungan lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik
8. Berperan penting dalam Gerakan peningkatan gizi 1000 hari pertama kehidupan.

Untuk melihat tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dalam meningkatkan konsumsi ikan, diperlukan indikator kinerja berupa angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Ada beberapa manfaat yang didapat dari angka konsumsi ikan, yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah
2. Mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah
3. Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani.

Adapun cara perhitungan angka konsumsi ikan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AKI = A + B + C$$

Dimana:

- A = Konsumsi di rumah tangga
- B = Konsumsi di luar rumah tangga
- C = Konsumsi tidak tercatat

Catatan:

1. **Konsumsi di Rumah Tangga**, dihitung berdasarkan data susenas BPS yang dikonversi ke dalam bentuk setara utuh segar. Komponen jenis ikan yang dihitung mencakup 4 (empat) kelompok, yaitu (1) ikan dan udang segar, (2) ikan dan udang asin/diawetkan, (3) terasi/petis (bumbu-bumbuan), (4) ikan dalam kelompok makanan jadi (ikan bakar, presto, pindang, bakar, dan lain sebagainya). Data keempat komponen tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan karena memiliki satuan yang berbeda, dan masih memerlukan faktor konversi dari ikan dalam bentuk asin/awetan, bumbu-bumbuan ke ikan dalam bentuk segar. Selain itu diperlukan juga konversi untuk ikan yang berasal dari kelompok makanan/minuman jadi dari satuan potong ke satuan kilogram
2. **Konsumsi di Luar Rumah Tangga**, memperhitungkan (1) perkembangan hotel, restoran dan katering, (2) perkembangan tamu hotel dan restoran, (3)

perkembangan penyediaan menu ikan oleh catering, (4) potensi kebutuhan ikan di rumah tangga khusus, yaitu (a) orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, Lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu Yayasan atau Lembaga; dan (b) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

3. **Konsumsi Tidak Tercatat**, seperti produk olahan ikan berbahan surimi, seperti nugget ikan, bakso ikan, pempek, siomay, otak-otak, dan lain sebagainya.

Konsumsi ikan di Kota Dumai perlu ditingkatkan dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Angka konsumsi ikan di Kota Dumai relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan data provinsi Riau maupun nasional. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Dumai, diketahui bahwa angka konsumsi ikan Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 49,64 kg/kapita/tahun, sedangkan tahun 2023 belum diketahui nilainya karena belum divalidasi oleh DKP Provinsi Riau maupun KKP.

Tabel 20. Target Capaian Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai Tahun 2017-2022 dan Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

No	Uraian	Realisasi						2023	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Ralisasi
1	Kota Dumai	40,51	40,16	45,51	44,75	45,19	49,64	42	N/A
2	Provinsi Riau	42,36	43,13	47,27	48,49	44,28	50,31		N/A
3	Nasional	47,34	50,69	55,50	54,56	58,08	59,53		N/A

Catatan: Satuannya menggunakan kg/kapita/tahun  
 Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berikut analisa capaian indikator kinerja utama angka konsumsi ikan, yaitu sebagai berikut.

1. Capaian kinerja untuk indikator angka konsumsi ikan pada tahun 2023 belum bisa menggambarkan capaian yang meningkat/menurun. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya validasi data oleh DKP Provinsi Riau sebagai validator daerah dan KKP sebagai validator pusat. Pada tahun 2022, realisasi angka konsumsi ikan di Kota Dumai mencapai 49,64 kg/kapita tahun. Namun, karena belum adanya data hasil capaian kinerja pada tahun 2023, maka belum bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
2. Faktor pendorong dalam melakukan capaian indikator angka konsumsi ikan adalah sebagai berikut:

- a. Aktif melakukan survey terhadap komponen Nilai B dan Nilai C untuk mendapatkan prediksi capaian angka konsumsi ikan.
  - b. Sampel data mendekati dengan sampel data yang telah ditetapkan oleh validator pusat dan mewakili data Kota Dumai
  - c. Enumerator melakukan pendataan setiap bulan, sesuai dengan sampel data yang telah ditetapkan
3. Faktor penghambat capaian indikator kinerja dalam meningkatkan angka konsumsi ikan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya pemahaman tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan.
  - b. Rendahnya suplai ikan, akibat kurang lancarnya distribusi pemasaran ikan.
  - c. Belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi selera konsumen.
  - d. Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
4. Tindak lanjut capaian indikator kinerja utama angka konsumsi ikan kedepannya adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan ketersediaan ikan di pasaran terutama untuk jenis ikan yang preferensinya tinggi, yaitu ikan olahan, ikan lele, dan ikan nila.
  - b. Penguatan distribusi dan stabilisasi harga ikan. Karena tidak semua wilayah di Kota Dumai menjadi sentra produksi perikanan, sehingga diperlukan penguatan distribusi penting untuk menjaga pasokan ikan yang merata dan pada akhirnya menjaga stabilitas harga.
  - c. Peningkatan aksesibilitas/keterjangkauan ikan pada rumah tangga yang konsumsi ikannya masih rendah yang mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, fisik dan sosial. Secara ekonomi dapat ditingkatkan melalui program ikan murah melalui pengembangan pasar secara periodik pada berbagai lokasi. Secara fisik dapat dilakukan dengan (1) penyediaan infrastruktur pemasaran ikan yang menjangkau daerah-daerah yang jauh, (2) pelaksanaan even bazar ikan murah dan kampanye makan ikan, (3) pembangunan pasar ikan, serta (4) diversifikasi produk olah ikan yang variatif dengan harga terjangkau dan bentuk yang menarik. Akses sosial dapat ditingkatkan dengan (1) promosi secara konsisten dan terus menerus tentang manfaat ikan bagi kecerdasan dan kesehatan, (2) menginisiasi program bagi

pemerintah untuk wajib menyajikan menu ikan pada berbagai acara mengadopsi kebijakan Kementerian Pertanian yang mewajibkan pangan lokal sebagai upaya pengenalan dan peningkatan frekuensi makan ikan.

- d. Peningkatan preferensi konsumsi ikan untuk meningkatkan motivasi ikan karena budaya makan ikan di Kota Dumai belum terbentuk sehingga harus dilakukan promosi dan edukasi yang konsisten sehingga ikan dapat menjadi pilihan utam sumber protein yang dikonsumsi rumah tangga.

### 3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022-2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.:

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	706	742	1.020,3	1.057,43	144,52%	142,51%
		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	288	308	382,69	344,07	132,88%	111,71%
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	18	20	18	23	100%	115%
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	31	34	31	47	100%	138,23%
		Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	42	42	49,64	N/A	118,19%	N/A

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel perbandingan realisasi kinerja di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Produksi Perikanan Tangkap

- a. Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama yang harus diampu oleh Dinas Perikanan Kota Dumai selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikator pertama adalah produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2022, target produksi perikanan tangkap adalah sebesar 706 ton dengan realisasi sebesar 1.020,3 ton atau sebesar 144,52%.
- b. Pada tahun 2023, target produksi perikanan tangkap adalah sebesar 742 ton dengan capaian produksi sebesar 1.057,43 ton atau sebesar 142,51%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 37,13 ton atau sebesar 3,64%.

#### 2. Produksi Perikanan Budidaya

- a. Pada tahun 2022, target produksi perikanan budidaya adalah sebesar 288 ton dengan realisasi sebesar 382,69 ton atau sebesar 132,88%. Pada tahun 2022 terdapat 7 komoditas penyumbang produksi perikanan budidaya, yaitu nila, gurami, lele, patin, bawal, bandeng, dan udang vanname.
- b. Pada tahun 2023, target produksi perikanan budidaya adalah sebesar 308 ton dengan realisasi sebesar 344,07 ton atau sebesar 111,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terjadi penurunan produksi sebesar 10,09%.
- c. Penurunan angka produksi sampai dengan bulan November pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 adalah (1) infeksi penyakit ikan, terutama pada udang; (2) faktor cuaca; (3) keterbatasan modal; serta (4) keterbatasan keterampilan dan pengetahuan teknologi budidaya.

### **3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

- a. Pada tahun 2022, target cakupan bina kelompok nelayan adalah sebanyak 18 kelompok dengan capaian sebanyak 18 kelompok atau sebesar 100%. Kelompok tersebut tersebar di 4 (empat) wilayah kecamatan di Kota Dumai, yaitu Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Sungai Sembilan.
- b. Pada tahun 2023, target cakupan bina kelompok nelayan adalah sebanyak 20 kelompok dengan capaian sebanyak 23 kelompok atau sebesar 115%. Pada tahun 2023, terjadi penambahan 3 (tiga) KUB baru yaitu KUB Sungai Sepih Berkah, KUB Sampan Dayung, dan KUB Tenggiri, serta 2 (dua) KUB lama yang aktif Kembali, yaitu KUB Senangin dan KUB Mekar Jaya.

### **4. Cakupan Bina Kelompok Budidaya**

- a. Pada tahun 2022, target cakupan bina kelompok pembudidaya ikan adalah sebanyak 31 kelompok dengan capaian sebanyak 31 kelompok atau sebesar 100%.
- b. Pada tahun 2023, target cakupan bina kelompok pembudidaya ikan adalah sebanyak 34 kelompok dengan capaian sebanyak 47 kelompok atau sebesar 138,23%. Pada tahun 2023 terjadi penambahan kelompok baru sebanyak 4 (empat) kelompok, yaitu Pokdakan Melati Jaya, Pokdakan Prabu Jaya, Pokdakan Fastabiqul Khoirot dan Pokdakan Harapan Permai. Dan sisanya sebanyak 12 kelompok merupakan kelompok lama yang sudah terbentuk dan aktif kembali melakukan aktivitas pembudidayaan ikan

## 5. Angka Konsumsi Ikan

- a. Pada tahun 2022, target indikator angka konsumsi ikan adalah sebanyak 42 kg/kapita/tahun. Realisasi capaian indikator pada tahun tersebut adalah sebanyak 49,64 kg/kapita/tahun atau sebesar 118,19%.
- b. Pada tahun 2023, target indikator angka konsumsi ikan adalah sebanyak 42 kg/kapita/tahun. Namun untuk realisasi capaian indikator belum dapat dilaporkan karena masih menunggu validasi dari DKP Provinsi Riau dan KKP.

Dari hasil analisa di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah tahun 2023 dapat dikatakan cukup berhasil walaupun 3 (tiga) indikator belum dilaporkan secara penuh sampai dengan bulan Desember 2023. Adapun ketiga indikator tersebut adalah: (1) produksi perikanan tangkap, data tervalidasi sampai dengan bulan November 2023; (2) produksi perikanan budidaya, data tervalidasi sampai dengan bulan November 2023; serta (3) angka konsumsi ikan, data belum divalidasi oleh DKP Provinsi Riau dan KKP.

### 3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2023	Tingkat Kemajuan	Keterangan
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	853	1.057,43	123,96%	Data s/d tahun 2023
		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	377	344,07	91,26%	Data s/d tahun 2023
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	26	23	88,46%	Data s/d tahun 2023
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	43	47	109,30%	Data s/d tahun 2023
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	42	49,64	118,19%	Data s/d tahun 2022

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



Berdasar Tabel di atas, sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Dumai adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Produksi perikanan tangkap dengan tingkat kemajuan sebesar 123,96%
- b. Produksi perikanan budidaya dengan tingkat kemajuan sebesar 91,26%
- c. Cakupan bina kelompok nelayan dengan tingkat kemajuan 88,46%
- d. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dengan tingkat kemajuan sebesar 109,30%
- e. Angka konsumsi ikan dengan tingkat kemajuan sebesar 109,30%. Untuk indikator kinerja angka konsumsi ikan, realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Jadi tingkat kemajuan capaian kinerja yang dilaporkan sampai dengan tahun 2023.

### 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Data capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Dumai perlu dilakukan perbandingan dengan realisasi nasional. Data perbandingan yang dilakukan adalah data realisasi tahun 2022. Hal ini dilakukan karena data pada tahun 2022 sudah divalidasi dan dipublikasi secara nasional. Adapun data perbandingan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Provinsi Riau	KKP	Keterangan
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.020,3	139.309,65	7.046.425,53	
		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	382,69	120.319,50	14.776.056,93	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	18	-	-	Kewenangan Kota
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	31	-	-	Kewenangan Kota
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	49,64	50,31	59,53	

Sumber: Satu Data KKP (2023)

### 3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan perikanan, Dinas Perikanan Kota Dumai didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.056.886.679,- (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 7.397.327.473,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah dan belanja modal sebesar Rp. 659.559.206,- (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebesar Rp 7.754.853.716,57 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima puluh tujuh sen). Adapun rincian realisasi anggaran tersebut adalah (1) belanja operasi sebesar Rp. 7.108.879.518,57 (tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah lima puluh tujuh sen); dan (2) belanja modal sebesar Rp. 645.974.198,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan puluh delapan rupiah). Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 24. Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.024.608.581	5.769.386.784	95,76%
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	213.726.500	206.674.265	96,70%
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.743.552.298	1.703.809.367,50	97,72%
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	74.999.300	74.983.300	99,98%
<b>Total</b>			<b>8.056.886.679</b>	<b>7.754.853.716,57</b>	<b>96,25%</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Perikanan adalah sebesar Rp. 7.754.853.716,57 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima puluh tujuh sen) atau sebesar 96,25%. Walaupun penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, pengelolaan keuangan sudah cukup optimal.

Dalam penyerapan anggaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu sebagai berikut

- a. Faktor perencanaan anggaran, merupakan acuan yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran. Perencanaan ini dapat membantu dalam memetakan kebutuhan secara komprehensif dan memformulasikan strategi bagi setiap sektor unit kerja. Perencanaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun adanya terjadinya mutasi pegawai, pegawai pensiun, standar harga, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi perencanaan yang telah ditetapkan pada saat proses pelaksanaan.
- b. Faktor pelaksanaan anggaran, merupakan tahap dimana sumber daya manusia digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran setelah perencanaan anggaran ditetapkan. Hal yang mungkin akan terjadi dalam proses pelaksanaan adalah anggaran yang disusun dengan baik bisa saja tidak terlaksana sesuai tepat waktu.
- c. Faktor sumber daya manusia, merupakan poin penting dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran. Namun pada pelaksanaannya SDM yang dimiliki banyak tidak memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Faktor pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan karena beberapa faktor, yaitu cuaca, dokumen yang diajukan tidak sesuai, persediaan bahan baku yang dibutuhkan, dan pencairan anggaran.
- e. Faktor regulasi, merupakan proses untuk memastikan bahwa sebagai standar persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Berdasarkan kondisi di lapangan, dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perikanan secara umum sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Namun ada beberapa hal yang perlu ditinjau lagi pada saat pelaksanaan anggaran di lapangan.
- f. Faktor komitmen. Hal ini merupakan salah satu yang harus ditegaskan dari awal pelaksanaan anggaran. Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan.

## **PROGRAM 1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini merupakan program yang mendukung pelaksanaan kegiatan rutin di Dinas Perikanan Kota Dumai. Pada program ini, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 sub kegiatan. Pagu anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebesar Rp.

6.024.608.581,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.769.386.784 atau 95,76%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut.

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.919.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.894.600,- dengan capaian sebesar 99,97%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Pagu anggaran adalah sebesar RP. 76.919.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 76.894.600,- atau sebesar 99,97%. Pada sub kegiatan ini, target kinerja adalah sebanyak 4 laporan dengan realisasi output sebanyak 4 laporan atau 100%.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 3.084.263.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.866.798.145 atau sebesar 92,95%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Pada sub kegiatan ini target kinerja adalah sebanyak 22 orang/bulan dengan realisasi output sebanyak 20,45 orang/bulan atau sebesar 92,95%.
3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.298.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.298.000,- atau sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan indikator kinerja jumlah rencana kebutuhan

barang milik daerah SKPD. Pagu anggaran adalah sebesar Rp 43.298.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.298.000,- atau sebesar 100%. Target kinerja adalah sebesar 2 (dua) dokumen dengan realisasi output 2 (dua) dokumen atau sebesar 100%.

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 505.046.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 501.020.906,- atau sebesar 99,20%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 6 (enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 10.083.700 dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.
  - b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 168.978.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 165.866.745,- atau sebesar 98,16%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.
  - c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp 18.590.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.590.000,- atau sebesar 100%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.
  - d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator kinerja jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 20.985.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.344.010,- atau sebesar 96,95%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.

- e. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 6.720.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.585.000,- atau sebesar 97,99%. Target kinerja adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) dokumen.
  - f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 279.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 279.561.451,- atau sebesar 99,95%. Target kinerja adalah 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) laporan.
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 501.108.206,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 497.521.936,- atau sebesar 99,28%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan dengan indikator kinerja jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 125.208.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.160.000,- atau sebesar 99,96%. Target kinerja adalah sebanyak 1 (satu) unit dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) unit atau sebesar 100%.
  - b. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan pagu anggaran Rp. 151.194.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.180.000,- atau sebesar 98,01%. Target kinerja adalah sebanyak 6 (enam) unit dengan realisasi output sebanyak 6 (enam) unit atau sebesar 100%.

- c. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 24.824.270,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.300.000,- atau sebesar 97,89%. Target kinerja adalah adalah sebanyak 4 (empat) unit dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) unit atau sebesar 100%.
  - d. Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 199.881.336,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.881.336 atau sebesar 100%.
6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.229.976.769,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.202.095.953 atau sebesar 97,73%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 2.535.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.530.000,- atau sebesar 99,80%. Target kinerja adalah 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebesar 1 (satu) laporan atau sebesar 100%.
  - b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 196.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.039.797,- atau sebesar 90,56%. Target kinerja adalah 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebesar 1 (satu) laporan.
  - c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.030.841.769,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.021.526.156,- atau sebesar 99,10%. Target kinerja adalah sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) laporan atau sebesar 100%.

7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 583.996.306,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 581.757.244,07 atau sebesar 99,62%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 141.832.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.700.830 atau sebesar 99,20%. Target kinerja adalah sebanyak 9 (sembilan) unit dengan realisasi output sebanyak 9 (sembilan) unit atau sebesar 100%.
  - b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Pagu anggaran sebesar Rp. 32.680.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.673.770,- atau sebesar 99,98%. Target kinerja adalah sebanyak 8 (delapan) unit dengan realisasi output sebanyak 8 (delapan) unit atau sebesar 100%.
  - c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 409.483.506,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 408.382.644,07 atau sebesar 99,73%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 4 (empat) unit dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) unit.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak ada kendala yang mengganggu proses pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aliran kas yang telah ditetapkan. Pengadaan kebutuhan kantor telah



dilakukan secara e-katalog. Begitu juga dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

## **PROGRAM 2 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selanjutnya adalah program pengelolaan perikanan tangkap. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 213.726.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.674.265 atau sebesar 96,70%. Program pengelolaan perikanan tangkap ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota, dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 213.726.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 206.674.265,- atau sebesar 96,70%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut
  - Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dengan indikator kinerja jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 213.726.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.674.265,- atau sebesar 96,70%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 18 kelompok dengan realisasi output sebanyak 18 kelompok atau 100%. Pada sub kegiatan ini, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah (1) pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan, (2) pelatihan laminasi kapal bagi nelayan, dan (3) pengawasan usaha perikanan. Kegiatan ini ditujukan kepada kelompok nelayan binaan Dinas Perikanan Kota Dumai.





Gambar 6. Sosialisasi Pengawasan Usaha Perikanan pada Nelayan  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan updating data perikanan tangkap. Data tersebut berupa data kelompok nelayan, jumlah nelayan, alat tangkap yang digunakan, dan armada yang dimiliki.
2. Tidak memiliki *time table* pembinaan dan pendampingan
3. Pelatihan laminasi kapal untuk nelayan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selalu melakukan updating data minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Hal ini dilakukan agar data yang akan dipublikasi nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penyuluh PNS maupun penyuluh non PNS harus menyusun *time table* kegiatan pembinaan dan pendampingan. Kegiatan tersebut harus dimonitoring dan evaluasi per triwulan untuk melihat capaian kinerja dari pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan
3. Jika ingin melaksanakan kegiatan dengan melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga, hal yang harus diperhatikan adalah harus memiliki jadwal pelatihan yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga. Jadwal pelatihan

tersebut berguna pada saat Dinas Perikanan Kota Dumai ingin melaksanakan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengunduran jadwal pelatihan dari jadwal yang telah ditetapkan.

### **PROGRAM 3 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selanjutnya adalah program pengelolaan perikanan budidaya. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 1.743.552.298,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.703.809.367,50 atau sebesar 97,72%. Program pengelolaan perikanan budidaya ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 690.953.879,- dengan realisasi anggaran Rp. 674.796.250,- atau sebesar 97,66%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil dengan indikator kinerja jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 690.953.879,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 674.796.250,- atau sebesar 97,66%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 10 kelompok dengan realisasi output sebanyak 10 kelompok atau 100%. Pada sub kegiatan ini dilakukan pemberian hibah kepada kelompok pembudidaya ikan binaan Dinas Perikanan Kota Dumai berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 10 Kelompok tersebut telah melewati fase validasi sebelum penetapan kelompok penerima hibah. Pemberian hibah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi kelompok pembudidaya ikan.





Gambar 7. Serah Terima Hibah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Dalam pelaksanaan sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada standar batas atas dan batas bawah terhadap pagu anggaran hibah. Hal ini mempersulit perangkat daerah terutama Dinas Perikanan Kota Dumai dalam menetapkan anggaran.
- 2) Tidak ada syarat khusus yang ditetapkan dalam menyeleksi calon kelompok penerima hibah.
- 3) Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan hibah.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Dinas Perikanan Kota Dumai melakukan Langkah strategis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dinas Perikanan melakukan standar batas atas dan batas bawah terhadap pagu anggaran hibah. Karena pagu anggaran hibah sudah termasuk pada pagu indikatif rancangan awal renja.
- 2) Selain menetapkan pagu anggaran hibah, Dinas Perikanan harus selektif menyeleksi calon kelompok penerima hibah. Minimal memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 3) Penyampaian laporan penggunaan hibah perlu disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kelompok terhadap hibah yang

diterima. Penyampaian laporan belanja hibah harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hibah diserahkan kepada kelompok penerima hibah. Penyampaian laporan ini harus didukung dengan surat pernyataan pertanggungjawaban bahwa hibah yang telah diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan salinan bukti serah terima hibah.

2. Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.052.598.419,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.029.013.117,50 atau sebesar 97,76%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah prasarna pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 526.531.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 509.990.162 atau sebesar 96,86%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 1 (satu) unit dan realisasi output sebanyak 1 (satu) unit. Pada sub kegiatan ini kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal aliran kas.
  - b. Sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 200.539.119,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.609.000,- atau sebesar 99,04%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 1 (satu) dokumen dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) dokumen. Pada sub kegiatan ini dilakukan uji kualitas air dengan menggunakan alat ukur sederhana. Hasil uji tes tersebut menjadi dasar terkait kondisi perairan budidaya perikanan pada kelompok pembudidaya ikan. Selain kegiatan uji kualitas air untuk kesehatan ikan dan lingkungan, pada sub kegiatan ini juga dilakukan pelatihan

budikdamber kepada 80 KK yang beresiko stunting. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023. Tujuan dari pelatihan budikdamber adalah (1) untuk mencukupi gizi keluarga akan protein hewani, (2) solusi bagi keluarga untuk berbudidaya tanpa memikirkan lahan untuk berbudidaya, dan (3) meningkatkan pendapatan bagi keluarga beresiko stunting.



Gambar 8. Uji Kualitas Air Menggunakan Alat Ukur Sederhana  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



Gambar 9. Pelatihan Budikdamber Bagi Keluarga Beresiko Stunting  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan sub kegiatan ini, terutama pada kegiatan rutin kesehatan ikan dan

lingkungan adalah (1) Kota Dumai tidak memiliki laboratorium untuk uji kualitas air, sehingga mempersulit para pembudidaya untuk melakukan uji kualitas air, (2) Karena laboratorium uji kualitas air berada di luar Kota Dumai, sampel air yang diambil mudah terkontaminasi sehingga mempengaruhi hasil uji lab, (3) tidak mempunyai SDM yang kompeten di bidangnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu (1) pengadaan alat pengukur kualitas air sederhana, (2) teknik pengambilan sampel air dan tata cara penyimpanan sampel air sebelum dibawa ke laboratorium untuk di uji, (3) pelatihan dan pendampingan kepada penyuluh maupun pegawai dalam teknik pengambilan sampel dan pengujian sampel air dengan menggunakan alat ukur sederhana.

- c. Sub kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat dengan indikator kinerja jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 122.330.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.527.600,- atau sebesar 96,89%. Target indikator kinerja adalah sebesar 250 orang dengan realisasi output sebanyak 250 orang atau sebesar 100%. Sub kegiatan fokus kepada pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan.





Gambar 10. Pembinaan dan Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

- d. Sub kegiatan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di Darat dengan indikator kinerja luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilindungi. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 203.197.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 201.886.355,50 atau sebesar 99,35%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 1.050 Ha dengan realisasi output sebanyak 1.050 Ha.

#### **PROGRAM 4 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selanjutnya adalah program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 74.999.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.983.300,- atau sebesar 99,98%. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 74.999.300,- dengan realisasi anggaran Rp.

74.983.300,- atau sebesar 99,98%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

- a. Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 74.999.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.983.300,- atau sebesar 99,98%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 0,1 ton dengan realisasi output sebanyak 0,1 ton atau 100%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Adapun target dari kegiatan ini adalah anak PAUD/TK. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak usia sekolah mau untuk makan ikan, baik itu ikan segar maupun produk olahan ikan.



Gambar 11. Peringatan Hari Ikan Nasional di Kota Dumai Tahun 2023  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)





Gambar 12. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Bunda Kreatif  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



Gambar 13. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Babul Khoiroh  
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Untuk capaian program dan kegiatan urusan pilihan kelautan dan perikanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai tahun anggaran 2023 dapat dijabarkan secara rinci pada Tabel di bawah ini.

Tabel 25. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>6.024.608.581</b>	<b>5.769.386.784</b>	<b>95,76%</b>			
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>76.919.000</b>	<b>76.894.600</b>	<b>99,97%</b>			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	76.919.000	76.894.600	99,97%			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.084.263.500</b>	<b>2.866.798.145</b>	<b>92,95%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.084.263.500	2.866.798.145	92,95%	1. Terjadinya mutasi 2 orang pegawai ke PD lain 2. Terdapat 2 orang pegawai yang pensiun	Pencairan keuangan sesuai dengan jumlah pegawai	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.298.000</b>	<b>43.298.000</b>	<b>100%</b>			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	43.298.000	43.298.000	100%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>505.046.800</b>	<b>501.020.906</b>	<b>99,20%</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.083.700	10.083.700	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.978.100	165.866.745	98,16%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.590.000	18.580.000	99,95%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.985.000	20.344.010	96,95%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000	6.585.000	97,99%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.690.000	279.561.451	99,95%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>501.108.206</b>	<b>497.521.936</b>	<b>99,28%</b>			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	99,96%			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.194.000	148.180.000	98,01%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	24.824.270	24.300.000	97,89%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.881.936	199.881.936	100%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.229.976.769</b>	<b>1.202.095.953</b>	<b>97,73%</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.535.000	2.530.000	99,96%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.600.000	178.039.797	90,56%	Ada 1 token listrik yang bermasalah dan dalam proses perbaikan	Melakukan perbaikan token listrik dan pencairan anggaran sesuai dengan kebutuhan pemakaian	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.841.769	1.021.526.156	99,10%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>583.996.306</b>	<b>581.757.244,07</b>	<b>99,62%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	141.832.800	140.700.830	99,20%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.680.000	32.673.770	99,98%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.483.506	408.382.644,07	99,73%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>213.726.500</b>	<b>206.674.265</b>	<b>96,70%</b>			
				<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota</b>	<b>213.726.500</b>	<b>206.674.265</b>	96,70%			
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	213.726.500	206.674.265	96,70%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.743.552.298</b>	<b>1.703.809.367,50</b>	<b>97,72%</b>			
				<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>690.953.879</b>	<b>674.796.250</b>	<b>97,66%</b>			
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	690.953.879	674.796.250	97,66%			
				<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.052.598.419</b>	<b>1.029.013.117,50</b>	<b>97,76%</b>			
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	526.531.300	509.990.162	96,86%			
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	200.539.119	198.609.000	99,04%			
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	122.330.500	118.527.600	96,89%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	203.197.500	201.886.355,50	99,35%			
				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>74.999.300</b>	<b>74.983.300</b>	<b>99.98%</b>			
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>74.999.300</b>	<b>74.983.300</b>	<b>99.98%</b>			
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	74.999.300	74.983.300	99.98%			

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

### 3.6 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 26. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (5)
Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.050	1.401,5	133,48%			
Sasaran: Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap (ton)	742	1.057,43	142,51%			
	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	308	344,07	111,71%			
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	20	23	115%			
	Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	34	47	138,23%			
	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	42	N/A	N/A			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	6.024.608.581	5.769.386.784	95,76%
Program Pengelolaan Perikanan	Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	76,92%	88,46%	115%	213.726.500	206.674.265	96,70%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	77,5%	117,5%	151,61%	1.743.552.298	1.703.809.367,50	97,72%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase wilayah sampel AKI	100%	100%	100%	74.999.300	74.983.300	99,98%

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

### 3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 27. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perikanan Kota Dumai

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	142,51%	96,70%	1,33



Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tangkap dan Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	115%		
	Produksi Perikanan Budidaya	111,71%	97,72%	1,28
	Cakupan Bina Kelompok Budidaya	138,23%		
	Angka Konsumsi Ikan	N/A	99,98%	N/A

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang efisien dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum diketahui tingkat efisiensinya. Hal ini dikarenakan belum memiliki data valid terhadap capaian kinerja. Berikut penjelasan masing-masing dari indikator sasaran.

- a. Pada indikator kinerja utama produksi perikanan tangkap dan cakupan bina kelompok nelayan, tingkat efisiensinya adalah 1,33. Hal ini berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja dibagi dengan persentase capaian anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya termasuk dalam kategori efisien.
- b. Untuk indikator kinerja utama produksi perikanan budidaya dan cakupan bina kelompok budidaya, tingkat efisiensinya adalah sebesar 1,28. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya termasuk dalam kategori efisien.
- c. Sedangkan indikator kinerja utama angka konsumsi ikan, belum diketahui tingkat efisiensinya. Hal ini dikarenakan belum memiliki data valid terhadap capaian kinerja.

### 3.8 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Dumai mendapatkan penghargaan dari Walikota Dumai dalam Implementasi Kampung Germas. Penghargaan yang diberikan karena Dinas Perikanan melakukan kerja nyata terkait kehidupan germas dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan budidaya ikan dalam ember (budikdamber) kepada keluarga beresiko stunting untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan meningkatkan pendapatan.

Tabel 28. Prestasi dan Penghargaan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Implementasi Kampung Germas	Peran Serta dalam Implementasi Kampung Germas dengan melakukan budikdamber ikan kepada keluarga beresiko stunting	Kota	Walikota



Gambar. Penghargaan yang Diperoleh Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan akuntabilitas. LKjIP disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini, disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perikanan Kota Dumai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama. Terdapat 3 (tiga) IKU yang melebihi target 100%, yaitu produksi perikanan tangkap, cakupan bina kelompok nelayan dan cakupan bina kelompok budidaya. Indikator lainnya, seperti produksi perikanan tangkap, capaian kinerja mencapai 96,12%. Hal ini dikarenakan data yang dimiliki baru divalidasi oleh satu data KKP sampai dengan bulan November 2023, sedangkan IKU angka konsumsi ikan belum diketahui capaian kerjanya. Hal ini dikarenakan belum memiliki data yang divalidasi oleh satu data KKP.

Pada pelaksanaan, ada beberapa yang menjadi faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2023, yaitu:

1. Komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas Perikanan Kota Dumai dengan *stakeholder* terkait.
2. Manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi telah berjalan secara sinergis. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien, serta capaian output dan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Adapun rekomendasi Langkah-langkah perbaikan ke depan adalah sebagai berikut

1. Penyusunan perencanaan memperhatikan catatan terhadap evaluasi kinerja serta mempertimbangkan optimalisasi sumberdaya yang ada.

2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal Dinas Perikanan Kota Dumai.
3. Pelaksanaan pengendalian secara rutin untuk mengambil Langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target pada seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023. Semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas bersama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan



**H. AFRIAGAN, S.H., M.Si**  
NIP. 19720412 200112 1 003

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

**Visi** : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu  
**Misi I** : Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri  
**Sasaran** : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

TUJUAN										SASARAN								Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket		
Uraian	Indikator	Formula Hitungan	Kondisi Awal		Target						Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal		Target				Strategi	Keblijakan	Program	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	PP = PPT + PPB dimana: PP = Produksi Perikanan Tangkap PPT = Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya PPB = Produksi Perikanan Budidaya	1.036,12	1.004,36	994	1.049	1.108	1.170	1.229	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	$Produksi = \text{fraksi sampel} \left(\frac{N}{n}\right) \times \text{produksi sampel} (p)$ Dimana: N= Jumlah alat penangkapan ikan per stratifikasi dalam satu kabupaten/kota n= sampel setiap stratifikasi alat penangkapan ikan p= produksi sampel perikanan tangkap	706,35	710,57	706	742	778	818	853	Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil 2. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap 3. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 4. Pengembangan kapasitas nelayan kecil 5. Fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemirraan usaha bagi nelayan kecil 6. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	29	29	18	20	22	24	26													
			Produksi Perikanan Budidaya (ton)	$Produksi = \text{fraksi sampel} \left(\frac{N}{n}\right) \times \text{produksi sampel} (p)$ Dimana: N= Jumlah alat penangkapan ikan per stratifikasi dalam satu kabupaten/kota n= sampel setiap stratifikasi alat penangkapan ikan p= produksi sampel perikanan tangkap	329,77	293,79	288	308	329	352	377	Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 2. Pembinaan dan pemantauan serta pelatihan bagi pembudidaya ikan 3. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya 4. Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan 5. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 6. Fasilitas bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemirraan usaha bagi pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									
			Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	34	34	31	34	37	40	43												
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/tahun)	$AKI = A+B+C$ Dimana: A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	42	42	42	42	42	42	42	Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan 2. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan											


  
 Kepala,  
**H. AFRILYAN, S.H., M.Si**  
 NIP. 19720412 200112 1 003

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	742
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	308
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	20
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	34
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	42

  
Kepala  
**H. AFRILAGAN, S.H., M.Si**  
NIP. 19720412 200112 1 003





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut. T, MT**  
Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**  
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

**Pihak Pertama,**  
  
**MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut. T, MT**  
NIP. 19750313 199403 1 002



## Lampiran Perjanjian Kinerja

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap	Ton	742
		Produksi perikanan budidaya	Ton	308
		Cakupan bina kelompok budidaya	Kelompok	34
		Cakupan bina kelompok Nelayan	Kelompok	20
2	Pencapaian target nilai konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	42

#### Sasaran 1: Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Rp 213,726,500</b>
<b>1.1</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 213,726,500</b>
1.1.1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp 213,726,500
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Rp 1,370,394,798</b>
<b>2.1</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Rp 690,953,879</b>
2.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 690,953,879
<b>2.2</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Rp 679,440,919</b>
2.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 356,571,300
2.2.2	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 200,539,119
2.2.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp 122,330,500

	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>3</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Rp 74,999,300</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 74,999,300</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 74,999,300</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.556.415.598</b>

Dumai, Januari 2023

**WALI KOTA DUMAI,**  
  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

**KEPALA,**  
  
**MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut. T, MT**  
 NIP. 19750313 199403 1 002





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJADINAS PERIKANAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. AFRILAGAN, S.H., M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM,

MARS Jabatan: WALIKOTA DUMAI

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 25 September 2023  
  
PIHAK PERTAMA  
H. AFRILAGAN, S.H., M. Si  
NIP. 19720412 200112 1 003

## Lampiran Perjanjian Kinerja

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap	Ton	742
		Produksi perikanan budidaya	Ton	308
		Cakupan bina kelompok budidaya	Kelompok	34
		Cakupan bina kelompok Nelayan	Kelompok	20
		Nilai konsumsi ikan	Kg/kapita/thn	42

#### Program

#### Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 6,024,608,581
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp. 213,726,500
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp. 1,743,552,298
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 74,999,300

**Jumlah**

**Rp. 8,056,886,679**

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA



**H. PAISAL, SKM, MARS**

PIHAK PERTAMA



**H. AFRILAGAN, S.H., M. Si**  
NIP. 19720412 200112 1 003

**PENGUKURAN KINERJA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	$\frac{\text{Realisasi Produksi}}{\text{Target Produksi Daerah}} \times 100\%$	742	1.057.43	142,51%
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	$\frac{\text{Realisasi Produksi}}{\text{Target Produksi Daerah}} \times 100\%$	308	344,07	111,71%
		Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	$\frac{\text{Jumlah Kelompok mendapatkan pembinaan}}{\text{Target Daerah}} \times 100\%$	20	23	115%
		Cakupan bina kelompok budidaya	Kelompok	$\frac{\text{Jumlah Kelompok mendapatkan pembinaan}}{\text{Target Daerah}} \times 100\%$	34	47	138,23%
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	$\frac{\text{Realisasi AKI}}{\text{Target AKI}} \times 100\%$	42	N/A	N/A



Kepala,

**H. AFRILYAN, S.H., M.Si**  
NIP. 19721412 200112 1 003



**PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA REALISASI BELANJA TAHUN 2023  
DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>6.024.608.581</b>	<b>5.769.386.784</b>	<b>95,76%</b>			
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>76.919.000</b>	<b>76.894.600</b>	<b>99,97%</b>			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	76.919.000	76.894.600	99,97%			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.084.263.500</b>	<b>2.866.798.145</b>	<b>92,95%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.084.263.500	2.866.798.145	92,95%	1. Terjadinya mutasi 2 orang pegawai ke PD lain 2. Terdapat 2 orang pegawai yang pensiun	Pencairan keuangan sesuai dengan jumlah pegawai	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.298.000</b>	<b>43.298.000</b>	<b>100%</b>			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	43.298.000	43.298.000	100%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>505.046.800</b>	<b>501.020.906</b>	<b>99,20%</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.083.700	10.083.700	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.978.100	165.866.745	98,16%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.590.000	18.580.000	99,95%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.985.000	20.344.010	96,95%			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000	6.585.000	97,99%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.690.000	279.561.451	99,95%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>501.108.206</b>	<b>497.521.936</b>	<b>99,28%</b>			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	99,96%			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.194.000	148.180.000	98,01%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	24.824.270	24.300.000	97,89%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.881.936	199.881.936	100%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.229.976.769</b>	<b>1.202.095.953</b>	<b>97,73%</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.535.000	2.530.000	99,96%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.600.000	178.039.797	90,56%	Ada 1 token listrik yang bermasalah dan dalam proses perbaikan	Melakukan perbaikan token listrik dan pencairan anggaran sesuai dengan kebutuhan pemakaian	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.841.769	1.021.526.156	99,10%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>583.996.306</b>	<b>581.757.244,07</b>	<b>99,62%</b>			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.832.800	140.700.830	99,20%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.680.000	32.673.770	99,98%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.483.506	408.382.644,07	99,73%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>213.726.500</b>	<b>206.674.265</b>	<b>96,70%</b>			
				<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota</b>	<b>213.726.500</b>	<b>206.674.265</b>	96,70%			
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	213.726.500	206.674.265	96,70%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.743.552.298</b>	<b>1.703.809.367,50</b>	<b>97,72%</b>			
				<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>690.953.879</b>	<b>674.796.250</b>	<b>97,66%</b>			
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	690.953.879	674.796.250	97,66%			
				<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.052.598.419</b>	<b>1.029.013.117,50</b>	<b>97,76%</b>			
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	526.531.300	509.990.162	96,86%			
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	200.539.119	198.609.000	99,04%			
				Pembinaan dan Pemantauan	122.330.500	118.527.600	96,89%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembudidayaan Ikan di Darat						
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	203.197.500	201.886.355,50	99,35%			
				<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>74.999.300</b>	<b>74.983.300</b>	<b>99.98%</b>			
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>74.999.300</b>	<b>74.983.300</b>	<b>99.98%</b>			
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	74.999.300	74.983.300	99.98%			



Kepala,

**H. AFRI AGAN, S.H., M.Si**

NIP. 19720412 200112 1 003